



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA DENPASAR

UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA
2. Jabatan : WALIKOTA
3. NHK : 38803

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.150.000.000

1. Bangunan Seluas 75 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR ,
HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah Seluas 630 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL
SENDIRI Rp. 900.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 319.000.000

1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
12.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
17.000.000
3. MOBIL, TOYOTA JEEP Tahun 1983, HASIL SENDIRI Rp.
150.000.000
4. MOBIL, TOYOTA COROLLA ALTIS Tahun 2011, HASIL SENDIRI
Rp. 125.000.000
5. MOTOR, HONDA BEAT STREET Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 285.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 3.271.301.451

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 5.025.301.451



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 5.025.301.451

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.